

ABSTRACT

Tourism is a sector that has a significant role in changing and promising in the global structure. Despite the fact that the Bangkalan Regency has a sizable coastal area with tourism potential and Regional Regulation Number 1 of 2020 governing the Bangkalan Regency Tourism Development Master Plan, this regulation still regulates various forms of tourism in general. The tourism policies for coastal areas in Bangkalan Regency are one of the issues regarding this research.

This type of research is socio-legal research with a lawful and qualitative approach. Its goal was to analyze tourism policies for coastal areas in Bangkalan Regency so that the region's potential could be used to develop tourism for the benefit of the people of Bangkalan Regency. This research results in the first, based on the existing legal vacuum, it is very important to make regulations related to tourism policies for coastal areas in Bangkalan Regency. Secondly, there are a number of challenges, such as a legal vacuum regarding spatial planning and coastal policy specifications, a lack of communication, and budgetary technical issues, so that in order to optimize these policies, the Bangkalan Regency Government and the community must work closely together.

Keywords: Tourism, Policy, Development, Bangkalan Regency, Coastal Area.

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran kuat terhadap perubahan dan sangat menjanjikan pada struktur global. Kendati memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, namun peraturan tersebut masih mengatur jenis pariwisata secara umum, padahal Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten yang memiliki kawasan pesisir yang luas dengan potensi wisatanya. Permasalahan penelitian ini meliputi kebijakan pariwisata bagi kawasan pesisir di Kabupaten Bangkalan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosio legal, dengan pendekatan perundang-undangan dan kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa kebijakan pariwisata bagi kawasan pesisir di Kabupaten Bangkalan, sehingga potensi kawasan tersebut bisa dimanfaatkan dengan pengembangan pariwisata untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menghasilkan pertama, berdasarkan kekosongan hukum yang ada, sangat penting untuk membuat peraturan terkait kebijakan pariwisata bagi kawasan pesisir di Kabupaten Bangkalan. Kedua, terdapat beberapa faktor penghambat di antaranya: kekosongan hukum dalam hal tata ruang dan spesifikasi kebijakan pesisir, kurangnya komunikasi dan faktor teknis anggaran sehingga dalam upaya untuk mengoptimalkan kebijakan tersebut, maka diperlukan sinergitas yang intensif dan terjaga antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata, Kebijakan, Pengembangan, Kabupaten Bangkalan, Kawasan Pesisir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	12
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TEORI DAN KONSEP KEBIJAKAN PARIWISATA BAGI KAWASAN PESISIR DI KABUPATEN BANGKALAN.....	15
2.1 Kebijakan Publik.....	15
2.1.1. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	17
2.1.2. Tingkatan Kebijakan Publik	21
2.1.3. Faktor-Faktor dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2.2 Pariwisata	25

2.2.1. Mandat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	30
2.2.2. Arah Pembangunan Kepariwisataa.....	31
2.2.3. Tata Kelola Destinasi Kepariwisataa.....	32
2.3 Kawasan Pesisir.....	33
BAB III PEMBAHASAN	36
3.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian Kabupaten Bangkalan	36
3.2. Kebijakan Pariwisata bagi Kawasan Pesisir di Kabupaten Bangkalan	41
3.3 Faktor Penghambat dalam Optimalisasi Kebijakan Pariwisata Bagi Kawasan Pesisir di Kabupaten Bangkalan.....	57
BAB IV	75
PENUTUP.....	75
4.1 Kesimpulan.....	75
4.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
BIODATA PENULIS.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya	6
Tabel 3.1 Kecamatan, Luas, dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangkalan..	38
Tabel 3.2 Letak, Tinggi, dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.....	40
Tabel 3.3 Pemantapan Daya Tarik Wisata Kabupaten untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Menarik Kunjungan Wisatawan dan Segmen yang Lebih Luas	52
Tabel 3.4 Arah Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten dalam Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Produk yang Bertujuan untuk Menarik Minat dan Loyalitas Segmen Pasar yang Ada.....	55
Tabel 3.5 Strategi Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Usaha di Bidang Pariwisata.....	69
Tabel 3.6 Strategi Pengembangan Kabupaten Bangkalan sebagai Destinasi Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal yang Unggulan untuk Pasar Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangkalan.....	37
Gambar 3.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2021.....	39
Gambar 3.3 Peta Tata Ruang Kawasan Pesisir Kamal	63